

## **Dimensi Pendidikan, Pembebasan, dan Perubahan Sosial: Studi Atas Pengalaman Perempuan di Kampung Perca Bogor dalam Menghadapi Covid-19**

**Raji Supriyadi<sup>1</sup> Elih Sudiapermana<sup>2</sup> Joni Rahmat Pramudia<sup>3</sup>**

Departemen Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [rajisupriyadi72@upi.edu](mailto:rajisupriyadi72@upi.edu)<sup>1</sup> [elsud@upi.edu](mailto:elsud@upi.edu)<sup>2</sup> [jonirp@upi.edu](mailto:jonirp@upi.edu)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi perubahan sosial pada kelompok perempuan, melalui pelatihan serta kolaborasi multipihak atas terbentuknya Kampung Perca di Kelurahan Sindangsari Bogor. Para perempuan di Kota Hujan tersebut telah menunjukkan partisipasinya sehingga menemukan cara keluar dari dampak Covid-19 melalui produksi usaha kreatif berupa kerajinan kain perca yang diawali dengan pelatihan menjahit. Usaha ini makin berkembang dan produknya diminati banyak orang. Ditambah kolaborasi berbagai pelaku dan pihak, seperti Pemerintah Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat serta dunia usaha, sehingga kampung di Sindangsari ini menjadi Kampung Perca, sebuah kampung tematik. Hasil dari penelitian ini; pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan dilakukan oleh komunitas perempuan sendiri. Kedua, peningkatan kemampuan melalui pelatihan. Ketiga, pendekatan yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi lokal, dimana banyak sekali limbah/sampah kain yang berasal dari pabrik maupun konveksi belum dimanfaatkan di wilayah Sindangsari. Keempat, di dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditekankan melalui proses belajar sosial yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan mendasari saling belajar. Dan, kelima, terbentuknya proses jejaring antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Kain Perca, Perubahan Sosial, Kolaborasi, Covid-19



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Habis gelap terbitlah terang. Begitulah kalimat yang sesuai untuk menggambarkan pengalaman komunitas perempuan di Kelurahan Sindangsari Kota Bogor. Para perempuan di Kota Hujan tersebut telah menunjukkan partisipasinya dan berjuang menemukan cara keluar dari badai Covid-19 dua tahun ke belakang tahun 2020-2021 lalu. Melansir Kompasiana, kalimat “habis gelap terbitlah terang” mengungkapkan bahwa setiap manusia akan mengalami masa-masa sulit, tetapi juga akan merasakan masa-masa membahagiakan.

Masa-masa sulit yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan saat badai Covid-19 menerpa masyarakat dunia. Pandemi akibat virus *corona* atau *coronavirus disease (Covid-19)* memakan banyak korban. Bahkan, Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada 30 Januari 2020 menyatakan pandemi Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Pandemi berdampak pada penduduk global, dalam berbagai aspek kehidupan semua kelompok umur dan juga terkait gender. Pemerintah Indonesia mulai Maret 2020, secara resmi menetapkan status pandemi Covid-19.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melansir total kasus kematian akibat Covid-19 pada bulan Juni 2021 mencapai 7.913 kasus. Jumlah ini tertinggi sejak pandemi melanda Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah meluasnya pandemi

diantaranya melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, kemudian diubah menjadi PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, dan PPKM Darurat. Kebijakan ini bertujuan pembatasan jarak sosial (*social distancing*) yang mewajibkan pembatasan kegiatan di ruang publik seperti di kantor, pabrik, tempat hiburan, tempat ibadah, restoran, sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Hal ini berakibat kontraksi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Sehingga, pandemi *Covid-19* bergeser bukan hanya menyangkut soal kesehatan saja, namun juga menjadi ancaman PHK terhadap pekerja, serta hilangnya lapangan pekerjaan di berbagai jenis wirausaha dan/atau sektor informal. Dampak ekonomi dari pandemi tidak hanya terjadi pada ekonomi makro tetapi juga terhadap perekonomian rumah tangga.

Pandemi *Covid-19* juga berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran Indonesia, tidak terkecuali di Kelurahan Sindangsari Bogor. Jumlah pengangguran di kelurahan ini semula 182 orang menjadi 278 orang. Pandemi *Covid-19* juga meningkatkan KK miskin dari 581 KK menjadi 1.190 KK. Oleh karenanya, perubahan sosial yang ditimbulkan dari wabah *Covid-19* merupakan realitas yang terjadi sehingga diperlukan cara-cara yang adaptif terhadap dinamika perubahan tersebut. Sedangkan “terbitlah terang” yang dimaksud adalah masyarakat dilingkupi rasa senang, bahagia bahkan merdeka dapat keluar dari kecemasan, ketakutan dan masa-masa sulit. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sindangsari Bogor terutama para perempuannya. Mereka melakukan inisiasi dan prakarsa membangun gagasan dengan mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di sekitar mereka, kemudian mengajak para perempuan lain untuk melakukan penguatan kapasitas dirinya, memiliki keterampilan, berkomunikasi dengan para pemangku wilayah yang memiliki otoritas serta kekuasaan, dan melakukan kerjasama dengan semua pihak. Kemudian, lahirlah apa yang sekarang tengah viral dan digunjingkan dijagat maya yakni terbentuknya Kampung Perca.

Saat ini Kampung Perca menjadi kampung tematik yang berada di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Wetan Kota Bogor. Kampung Perca lahir dari keprihatinan di tengah badai *Covid-19* yang turut dirasakan oleh warga masyarakat Kelurahan Sindangsari. Bahkan Kampung Perca Sindangsari sejak 2021 lalu telah menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Bogor, yang banyak dikunjungi warga dari berbagai wilayah. Hal tersebut juga didorong oleh derasnya arus informasi yang masif melalui saluran media massa baik cetak maupun elektronik (media berita kanal online), media sosial terutama Youtube, sehingga Kampung Perca semakin viral. Apalagi kehadiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga dikenal aktif di dunia maya saat meresmikan Kampung Perca, menjadi daya magnet banyak warga dari berbagai wilayah berkunjung ke Kampung Perca.

Berangkat dari uraian di atas, Kampung Perca Sindangsari Bogor menjadi penting untuk dikaji secara mendalam keterlibatan atau partisipasi perempuan di dalam mengorganisasikan dan mengembangkan masyarakatnya sehingga mampu keluar dari masa-masa sulit, menuju penguatan ekonomi. Hal tersebut menarik karena memadukan dua hal sekaligus, yakni kreatifitas dan arif terhadap sampah/ limbah terutama kain, sehingga meningkatnya ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan literatur pemberitaan sejumlah kanal berita *online* mengenai Kampung Perca yang diterbitkan dari tahun 2021 hingga 2022. Kemudian dianalisis menggunakan berbagai teori serta pendekatan pembangunan dan proses pemberdayaan masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kampung Perca lahir berawal dari keprihatinan Nining Sriningsih, warga RW 01 Kelurahan Sindangsari. Ia prihatin dengan kondisi para tetangga di sekitarnya. Bukan saja terbelit kesulitan ekonomi, melainkan banyak permasalahan keluarga yang harus dialami para tetangganya itu. Tergerak kemudian hatinya untuk mencoba membantu para tetangganya dengan mengajak mereka para ibu-ibu berlatih menjahit. Idenya didukung Mardianto, pemilik tempat kursus jahit dan konveksi Harapan Antar Sesama (HAS). Dia mempersilahkan mesin-mesin jahit yang ada di tempatnya dimanfaatkan untuk berlatih.

Begitupun sisa kain dan benang jahit yang tidak dipergunakan lagi, boleh dipakai. Dukungan lalu bertambah dari Enny Wulan, Ketua TP PKK Kelurahan Sindangsari waktu itu, yang memang berpengalaman di bidang fashion. Awal September 2020, ide Nining pun terwujud. Sebanyak 15 ibu menyatakan bersedia bergabung dalam gerakan itu. Lahirlah gerakan HAS Sabilulungan, yang artinya kurang lebih, Harapan Antar Sesama saling tolong menolong dalam kebersamaan.

Dukungan berlanjut kemudian datang dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yane Ardian. Bahkan Yane yang juga Ketua Dekranasda Kota Bogor menggagas sebuah ide besar. Menjadikan Kampung Sindangsari itu sebagai Kampung Perca. Baginya Kampung Perca bukan hanya akan menjadi solusi memberdayakan kaum perempuan. Melainkan untuk mendorongnya menjadi sebuah destinasi wisata baru Kota Bogor, yang berarti memberdayakan wilayah itu dengan potensi yang ada. Diakuinya, SDM di pelatihan kain perca HAS Sabilulungan sudah cukup baik. Namun untuk sebuah Kampung Perca, perlu tambahan kuantitas dan kualitas SDM-nya.

Di RW 01 Kelurahan Sindangsari memiliki potensi SDM, pinjaman mesin jahit dari PT HAS, limbah kain perca dan benang serta pelatih yang dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sindangsari. Dari hasil pelatihan menjahit selama dua bulan, 15 ibu-ibu mampu menghasilkan masker, sarung bantal, lap, taplak, kunciran dan bisa mendapatkan penghasilan walau hasilnya belum besar. Konsep desain Kampung Perca dimana semua rumah di sepanjang Kampung Perca akan di cat seragam, bisa berwarna putih atau abu muda agar terlihat bersih dan modern.

Setelah melewati perintisan dan persiapan panjang, pada hari Jumat 17 Desember 2021, Kampung Perca diresmikan oleh sejumlah pejabat. Kampung Perca ini bukan saja memberikan lapangan pekerjaan buat warga. Namun juga sekaligus menjadi tempat wisata. Kampung Perca Sindangsari diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya, pada Jumat (17/12/2021). Sesuai namanya, Kampung Perca sebagai wilayah yang memproduksi berbagai barang dan kerajinan dari limbah kain perca. Menurut Camat Bogor Timur Rena Da Frina, Kampung Perca merupakan salah satu kampung tematik yang ada di wilayahnya, yang terwujud berkat dukungan kolaborasi dari semua pihak. Kampung Perca dengan sistem kolaborasi antar semua instansi dan stakeholder. Banyak CSR yang kita dapatkan disini hampir Rp500 juta.

Kini Kampung Perca yang berada dalam binaan Dekranasda Kota Bogor, mampu menarik dukungan lebih luas. Antara lain dari KADIN, PHRI dan juga Bank BJB. Kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat di acara itu pun menjadi angin segar tersendiri. Berbagai dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu tentu akan semakin memperkuat eksistensi kampung tematik baru di Kota Bogor itu. Sejumlah bantuan CSR pengembangan Kampung Perca menasar pada peningkatan sarana dan prasarana bagi para pelaku usaha di dalamnya. Ibu-ibu yang tergabung dalam Kampung Perca itu diberdayakan secara optimal. Tujuan jangka panjangnya agar bisa menularkan kreativitas yang sama ke semua warga di sekitar Kampung Perca.

Kampung Perca diniatkan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama ibu-ibu. Banyaknya CSR dan bantuan itu adalah bonusnya. Ada dorongan untuk dikembangkan terus untuk mengurangi pengangguran, termasuk akan berdayakan anak-anak muda. Pembangunan Kampung Perca saat ini merupakan tahap pertama dan baru memiliki empat galeri untuk memasarkan produk. Selanjutnya secara bertahap dilakukan penambahan galeri yang ditempatkan di rumah-rumah warga. Target kita nanti ada 15 galeri yang tersebar di 6 RT di RW 06.

Di Kampung Perca Sindangsari sebelumnya memang ada konveksi rumahan, dan hal ini menjadi pokok penting dalam pengembangan Kampung Perca untuk pemberdayaan warga setempat. Sebagai wujud pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang masa pandemi *Covid-19* ini tidak ada penghasilan, karena suaminya diputus kerja, terlilit hutang rentenir, dan sebagainya. Saat ini, ada 15 orang kaum hawa yang tergabung mengkreasikan sisa potongan kain menjadi produk yang bernilai tinggi. Produk itu mulai dari pansy, auter, sarung bantal, body bag, keset, masker, dan sebagainya.

Sisi lain, wilayah Kampung Perca juga kini tampil berbeda dengan suasana lingkungan yang tertata dan menarik untuk dikunjungi terutama bagi pencari spot foto dan aneka kerajinan. Di luar gerai-gerai yang ada, pihaknya juga tengah membangun kerjasama dengan pihak lain untuk merambah pemasaran produk-produk Kampung Perca. Perjanjian kerjasama (MoU) sedang disiapkan dengan Uniklo khususnya. Dan yang jelas Kampung Perca ini dibawah Dekranasda punya gerai-gerai di mal Kota Bogor, pemasaran bisa dari situ dan bisa pesan secara online. Sedangkan bahan baku sisa potongan kain didapat dari konveksi-konveksi di Kota Bogor, umumnya di Bogor Timur. Untuk ketersediaan kain perca sendiri, saat ini masih tercukupi kebutuhannya dari wilayah sekitar Sindangsari.

Pemkot Bogor berkomitmen membangun Kota Bogor melalui potensi ekonomi kampung yang bakal terintegrasi dengan transportasi hingga 2024. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat meresmikan Alun-alun Kota Bogor, Senin (10/1/2022). Bima Arya mengatakan, pihaknya berkomitmen menuntaskan konsep membangun kota melalui potensi ekonomi kampung yang terintegrasi dengan transportasi hingga tahun 2024. Karenanya, ia terus mendorong potensi ekonomi warga di kampung-kampung yang salah satunya seperti Kampung Perca yang diresmikan akhir 2021 lalu. Jadi semua seperti yang bisa kita temui di Solo gitu ya, di Kauaman, ada satu lagi juga di Cirebon. Ia berpandangan karena Kota Bogor memiliki luas tidak besar, jadi kalau orang Jakarta ke Bogor dan parkir di Botani, parkir di Lippo Plaza Kebon Raya bisa naik transportasi umum Biskita Trans Pakuan bus Uncal untuk keliling lihat ke wilayah-wilayah, bukan hanya pusat kota. Jadi semua paket tersedia, produk ada, transportasi tersedia dan terjangkau.

## **Pembahasan**

Bila kita tengok dari perjalanan historis terbentuknya Kampung Perca di Kelurahan Sindangsari Kota Bogor dimulai dari dampak adanya penyebaran *Covid-19* yang berakibat kepada timbulnya masalah sosial, hingga mereka menemukan jalan keluar melalui proses internalisasi dan kolaborasi. Sebagaimana kita pahami, masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan, karena di dalamnya mengandung unsur yang merugikan, baik fisik dan nonfisik. Kebijakan-kebijakan penanganan *Covid-19* berupa karantina, isolasi, *work from home*, dan penerapan pembatasan jarak maupun gerak masyarakat oleh pemerintah, telah menimbulkan persoalan sosial, seperti keberfungsian keluarga akibat dari meninggalnya salah satu anggota keluarga. Kebijakan karantina juga dapat mengakibatkan perubahan pada gaya hidup seperti kurangnya aktivitas fisik, dan perubahan kebiasaan yang dapat memicu terjadinya stress dan kecemasan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan juga status gizi seseorang.

Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat *Covid-19* telah menyadarkan bahwa segala persoalan harus dilihat dalam perspektif ketahanan diri, dan ketahanan kolektif. Krisis ekonomi dan sosial akhirnya menuntut adanya upaya-upaya inovatif untuk pemecahan masalah. Ini berarti dibalik dampak yang ditimbulkan, *Covid-19* sesungguhnya juga menawarkan peluang munculnya inovasi dan kreativitas individu maupun masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh para perempuan di Kelurahan Sindangsari Kota Bogor. Mereka dapat keluar dari tekanan *Covid-19*. Mereka membuat aneka produk yang memiliki nilai ekonomi dari kain perca. Para perempuan di Sindangsari akhirnya akrab dengan isu lingkungan terutama sampah. Kain perca yang semula hanya limbah yang maupun sampah diubah menjadi barang mempunyai nilai ekonomi mulai dari pansy, auter, sarung bantal, body bag, keset, masker, dan sebagainya.

Dibalik proses perubahan ke arah lebih baik di Sindangsari harus dicatat sebagai bentuk partisipasi para perempuan yang mengasah kapasitas sehingga memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang menyangkut dirinya. Dengan demikian masyarakat yang demikian dapat mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. Melalui kapasitas pengelolaan pembangunan yang menyebabkan masyarakat lebih memiliki kemampuan untuk mengelola masa depannya. Ini berarti perempuan merupakan salah satu sumber daya manusia, walaupun selama ini proses pembangunan tidak bisa melepaskan diri dari "*cultural based*", dasar budaya yang melandasi karakter pembangunan yang berkecenderungan patrilineal, sehingga menempatkan perempuan sebagai obyek ketimbang subyek pembangunan.

Secara normatif, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Terutama perempuan dewasa. Ciri orang dewasa dapat dilihat dari dimensi fisik (biologis), hukum, sosial, dan psikologis. Secara fundamental, karakteristik kedewasaan atau kematangan seorang individu yang paling mendasar terletak pada tanggung jawabnya. Ketika individu sudah mulai memiliki kemampuan memikul tanggung jawab, dimana ia sanggup menghadapi kehidupannya sendiri dan mengarahkan diri sendiri (Mustofa Kamil, 2013). Kedewasaan secara sosial merupakan cerminan kematangan seorang individu. Hal ini dapat diamati dari kesiapannya dalam menerima tanggung jawab, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas-tugas pribadi dan sosialnya terutama untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun dalam kehidupan nyata maupun dalam pembangunan secara umum, status kaum hawa masih pada tatanan hirarkis posisi sub-ordinat atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum laki-laki. Atau banyak pihak menyebutkannya dengan istilah *gender stratification*, seperti kesenjangan ekonomi dan politik. Perempuan masih jauh di bawah laki-laki dalam memperoleh akses kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, perempuan tidak banyak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan dari pada laki-laki. Sedangkan secara politik, perempuan tidak lebih banyak menempati posisi-posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan dibanding laki-laki. *Covid-19* telah memberikan tekanan lebih kepada para perempuan. Saat dimana para suaminya sebagai tulang punggung keluarga terkena PHK atau menganggur akibat pembatasan gerak masyarakat. Mereka harus berjuang untuk turut mempertahankan ekonomi keluarga keluar dari krisis akibat *Covid-19*.

Pada dasarnya setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan dengan hak yang sama. Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti wanita atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Namun kenyataannya pembangunan kita masih bias gender. Dimana menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat dalam struktur pembangunan. Ketimpangan gender terlihat dari peran-perannya yang masih belum beranjak, yang lebih banyak pada sektor private maupun domestik. Menurut Mansour Fakhri (2020: 5) suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang

dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Banyak faktor yang menjadi penyebab ketimpangan gender, seperti adat atau tradisi, agama maupun kebijakan negara yang bias gender (Rosyidah & Dwisetyani: 2007). Disamping itu, perempuan harus menjalankan peran ganda selain mengurus pekerjaan rumah tangga juga dituntut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Relasi gender antar perempuan dan laki-laki menunjukkan relasi gender dengan nilai yang masih konvensional. Dikatakan demikian karena belum tampak adanya hubungan kesetaraan atau kesejajaran antara perempuan dan laki-laki (Koesbandijah, S., -, W., & Puji Astuti, T, 2013).

Menurut Titi Darmi (2016), faktor yang sehari-hari dialami perempuan adalah (1) beratnya beban kerja dan panjangnya waktu kerja perempuan selain mengurus urusan rumah tangga, perempuan sangat tinggi berkontribusi atas keuangan keluarga; (2) masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dari pada laki-laki pada tahapan proses dan pelaksanaan pembangunan desa; (3) masih rendahnya peluang untuk meningkatkan kapasitas diri, misalnya masih ada sebagian masyarakat pedesaan yang beranggapan anak laki-laki lebih diutamakan. Perempuan masih terkesan di nomor duakan, dapat dilihat di kegiatan PKK, Dasa wisma, Posyandu, kelompok pengajian, arisan dan lain-lain, kegiatan tersebut masih bergelut di seputar masak-memasak, jahit-menjahit, dan urusan rumah tangga.

Bila menengok jauh ke belakang, perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan tercipta melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan dan negara. Melalui proses yang panjang pula, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Menurut Farida Hanum (2018: 7), melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasikan serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya.

Mendorong agar perempuan turut ikut serta berpartisipasi tentu diperlukan kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan. Seperti yang diikuti sejumlah perempuan di Sindangsari. Pendidikan dipandang sebagai usaha mengadakan aturan dan tata tertib yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Tidak ada manusia yang mau hidup sulit, bingung, susah, dan tidak bahagia. Pendidikan dianggap sebagai usaha merealisasikan kata hati, yang bertanggung jawab dan kesadaran norma, sehingga perilakunya menggambarkan kesesuaian kehidupan emosional (Oong Komar, 2006: 26).

Pendidikan memiliki karakter yang “merdeka” dalam arti fleksibel, membuka ruang dialog, dan mendorong partisipatif aktif. Dan pendidikan masyarakat punya lebih banyak perhatian “memerdekakan” mereka-mereka yang pendidikannya masih tertinggal, terpinggirkan, terdiskriminasi, serta mereka yang menderita bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya (Elih Sudiapermana, 2021: 15). Dalam arti pedagogik yang memberdayakan peserta didik dalam rangka membangun masyarakat baru, yakni masyarakat madani (Tilaar, 2000:44).

Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sebuah proses humanisasi, dimana hak-hak asasi manusia perlu dihormati. Peserta didik bukanlah mesin robot, melainkan manusia yang harus dibantu menuju proses pendewasaan. Ini artinya menuntut dalam prosesnya harus diarahkan agar potensi yang ada pada peserta didik dapat dikembangkan seoptimal mungkin, agar mampu menyumbangkan kemampuannya untuk pengembangan dirinya, dan pengembangan masyarakat. Pengembangan kapasitas melalui pendidikan maupun pelatihan hakikatnya untuk membangun masyarakat secara mandiri, di dalamnya juga mengandung proses belajar yang terus menerus, lebih tepatnya disebut proses bekerja sambil belajar. Proses belajar ini juga mendorong dilakukannya antisipasi yang berkelanjutan terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, keikutsertaan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan tidak sekedar kuantitas atau terpenuhinya administrasi pembangunan semata, namun juga terkait dengan suara-suara perempuan tentang ekonomi, kesehatan, ekologi, dan demokrasi. Sesungguhnya pembangunan butuh keseimbangan peran laki-laki dan perempuan. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan.

Sesungguhnya setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan ke arah dinamis maupun statis. Perbedaannya adalah, ada suatu masyarakat yang berubah dengan sangat cepat dan ada masyarakat lain yang berubah dengan sangat lamban. Dilihat dari sifat, faktor yang mendorong pendorong terjadinya perubahan sosial, yakni materialistik dan non materialistik atau idealistik (Soetomo, 2012: 43). Keduanya dapat menjadi pemicu awal perubahan, dan akan diikuti perubahan pada faktor lainnya. Secara umum, sumber perubahan yang bersifat non materialistik atau idealistik berupa nilai, kepercayaan, dan ideologi. Pada gilirannya sumber nilai akan membentuk sikap dan perilaku yang terwujud dalam bentuk relasi sosial. Bahkan perubahan nilai akan mendorong perubahan yang lebih besar yakni melahirkan perubahan struktur sosial. Perubahan nilai juga akan mendorong masyarakat lebih terbuka dalam mengadopsi ide-ide baru. Bila ditengok dari rentang waktu, perjalanan perubahan pada suatu masyarakat tertentu dapat dilihat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan bila dilihat dari tahapannya perubahan dapat terjadi pada lingkup mikro, intermediate, dan makro.

**Tabel 1. Tipe-Tipe Perubahan Sosial**

Rentang Waktu	Tahapan perubahan		
	Mikro (Individu)	Intermediate (Kelompok)	Makro (Masyarakat)
Jangka pendek	Tipe 1: • Perubahan sikap • Perubahan tingkah laku	Tipe 3: • Perubahan normatif • Perubahan administratif	Tipe 5: • Inovasi • Revolusi
Jangka panjang	Tipe 2: Perubahan siklus kehidupan	Tipe 4: Perubahan organisasional	Tipe 6: Evolusi sosio kultural

Sumber : Gerald Zaltman (1972) dalam Soetomo (2012: 59)

Perubahan yang terjadi pada masyarakat juga dibedakan dari asalnya yakni bersumber dari dalam (sistem sosial yang ada di masyarakat) dan dari luar komunitas atau sistem yang ada di masyarakat. Dalam pandangan Everett Rogers, perubahan yang berasal dari dalam sistem sosial masyarakat disebut imanen, dan bila terdorong dari luar sistem sosial masyarakat

disebut perubahan kontak (Rogers and Shoemaker, 1971: 8). Perubahan kontak merupakan dimana adanya hubungan langsung maupun tidak langsung antar warga masyarakat yang lebih luas di luar sistem sosialnya, seperti dalam bentuk berbagai intervensi program. Sumber daya atau energi dari luar juga dapat diletakkan sebagai bagian dari proses pengembangan kemampuan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, perubahan yang terjadi dapat merupakan perubahan yang bersumber dari kekuatan, potensi, dan sumber-sumber masyarakat sendiri tetapi dapat pula sebagai perubahan yang didorong oleh kekuatan dan potensi dari luar. Dalam kenyataannya sebetulnya jarang dijumpai suatu perubahan yang ada hanya bersumber dari salah satu diantara keduanya. Pada umumnya perubahan tersebut dipengaruhi baik oleh sumber dari dalam maupun dari luar. Perbedaannya terletak pada sumber mana yang lebih dominan. Pendekatan pembangunan masyarakat yang mengutamakan sumber, potensi, dan kekuatan dari dalam biasa disebut dengan *self-help approach*.

Pendekatan *self-help* didasarkan pada prinsip demokrasi dan prinsip menentukan nasib sendiri (Lyon, 1987: 116). Dalam kata lain, pembangunan dari dimensi ini bersifat humanis yang mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk aktif dan kreatif. Prinsip ini mengasumsikan bahwa masyarakat sendiri dapat menjadi aktor utama atau pelaku yang sangat berarti sekaligus menjadi pengendali proses pembangunan. Karena sesungguhnya setiap masyarakat mempunyai kemampuan dan potensi untuk berkembang atas kekuatan sendiri. Masyarakat memiliki sumber-sumber daya yang dapat dikembangkan bersama.

Namun harus diakui, bahwa dalam masyarakat sering dijumpai berbagai hambatan bagi pengembangan potensi tersebut, seperti sikap fatalisme, sikap ketergantungan, dan sikap kurang percaya pada kemampuan sendiri. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah menghilangkan hambatan tersebut dengan jalan membangkitkan kegairahan dan hasrat serta kepercayaan akan kemampuan sendiri yang kemudian diharapkan dapat menggairahkan hasrat swadaya baik pada tingkat perorangan, kelompok maupun masyarakat untuk memperbaiki nasib dan kondisi kehidupannya.

Dalam jangka panjang, proses tersebut secara perlahan tetapi pasti diharapkan akan menghasilkan perubahan yang mendukung baik pembaruan dalam seluruh lembaga, maupun pembaruan proses dan hubungan yang terdapat dalam masyarakat, meliputi bidang ekonomi, sosial, politik maupun kebudayaan. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat sendiri yang (1) Menentukan apa yang menjadi kebutuhannya, (2) Menentukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya, (3) Melaksanakan sendiri langkah yang sudah diputuskan (Lyon, 1987: 115).

Melalui tahapan di atas akan membawa dampak positif bagi tumbuh kembangnya kemandirian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena setiap warga masyarakat baik dalam kedudukannya sebagai individu maupun dalam kelompok mempunyai potensi dan kapasitas yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, peningkatan dan pengembangan kapasitas tersebut akan semakin cepat diperoleh melalui berbagai aktivitas bersama dan kerjasama dalam kelompok untuk memperbaiki kehidupan lingkungan komunitasnya dan dalam menanggapi berbagai tuntutan kehidupan yang selalu berkembang. Bahkan persoalan kemudian terjadinya timbunan kesenjangan di tingkat individu maupun masyarakat.

Oleh karena itu, kesadaran akan adanya kesenjangan antara realitas kondisi kehidupan yang ada dengan tuntutan-tuntutan yang selalu berubah dan berkembang akan mendorong tumbuhnya prakarsa dan kreativitas masyarakat. Hasil positif yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dari berbagai aktivitas bersama secara mandiri tersebut, akan mendorong masyarakat semakin meningkatkan kemandiriannya.

Walaupun demikian, pendekatan ini tetap mengakui pentingnya teknologi dan ide baru yang datang dari luar. Oleh karena itu, pendekatan *self-help* tidak harus diartikan sebagai menutup pintu terhadap intervensi dari luar. Gagasan dari luar dirinya masih tetap menjadi sumber penyelesaian masalah. Intervensi dari luar tetap diperlukan sepanjang dilakukan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan dan hasrat yang dinyatakan oleh masyarakat serta didudukkannya sebagai bagian dari suatu proses membina kemampuan atau *enabling process* (Combs dan Ahmed, 1980: 106).

Pendekatan ini menjanjikan banyak hal, terutama adalah terwujudnya suatu proses perubahan menuju perbaikan kondisi kehidupan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat sendiri. Pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat sendiri menjadi sangat *urgent*, sehubungan dengan seringnya dijumpai suatu lingkungan masyarakat yang mempunyai potensi yang cukup besar baik berupa sumber daya alam, manusia maupun sosial, tetapi tetap sebagai potensi laten dan tidak teraktualisasikan oleh karena beberapa sebab. Strategi pendekatan yang mengutamakan peranan masyarakat sendiri, potensi dan sumber daya yang laten tersebut akan terdorong muncul ke permukaan, sumber daya potensial dapat diidentifikasi dan dibuat aktual, sehingga akan lebih efektif memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidupnya. Upaya pendayagunaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sendiri tidak terbatas pada pemanfaatan potensi dan sumber daya yang laten dan belum dimanfaatkan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat dan optimalisasi potensi dan sumber daya yang sebelumnya sudah diolah.

Dengan pendekatan ini juga diharapkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tidak banyak menghilangkan unsur-unsur dasar yang menjadi identitas masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, pada dasarnya masyarakat yang menentukan sendiri apa kebutuhannya dan cara bagaimana untuk memenuhinya, maka dapat lebih diharapkan bahwa kegiatan pembangunan yang kemudian dijalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Dilihat dari prospek jangka panjang, pendekatan ini juga lebih bersifat mendidik masyarakat untuk tidak banyak bergantung dari luar serta memupuk kepercayaan diri, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dapat lebih diharapkan. Hal itu disebabkan karena pendekatan ini terjadi mekanisme bekerja sambil belajar terus menerus. Dengan demikian, keberhasilan pendekatan ini tidak dapat semata diukur melalui cara membandingkan hasil-hasil pembangunan dengan sekedar menggunakan metode *before-after*. Keberhasilan perlu dilihat dalam proses yang lebih panjang setelah intervensi dihentikan. Intervensi dikatakan berhasil apabila setelah program intervensi berakhir, dalam proses berikutnya masyarakat secara mandiri dapat melanjutkan berbagai aktivitas membangun yang bersifat swadaya dan swakelola. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan tidak menimbulkan ketergantungan tetapi justru dapat menumbuhkan proses berkelanjutan.

Walaupun demikian, harapan-harapan terhadap pendekatan *self-help* tersebut bukan tanpa hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya sebagian masyarakat berada dalam kondisi sosial ekonomi yang relatif masih rendah. Dalam kondisi seperti ini masyarakat memang sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan maupun dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri, karena keterbatasan sarana dan prasarana. Belum lagi apabila disadari, bahwa kondisi seperti itu sering terlalu dalam terpendam dari permukaan, sehingga untuk memunculkannya membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Disamping itu tidak jarang terjadi, bahwa proses dan mekanisme dalam pengambilan keputusan bersama masih banyak didominasi oleh elit komunitas.

Dengan demikian, dimungkinkan bahwa keputusan bersama yang diambil tidak selalu betul-betul mencerminkan masalah kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Kelemahan lain

adalah apabila dilihat dari kepentingan dalam skala makro. Pendekatan *self-help* yang dilakukan dengan ekstrim dan dalam pandangan sempit sering mengundang kekhawatiran akan mengisolasi lingkungan komunitas dengan masyarakat makronya. Oleh sebab itu, apabila pelaksanaan prinsip *self-help* dilakukan secara ekstrim dapat menjurus pada eksklusivitas sosial, ekonomi, dan kultural. Jelas ini tidak menguntungkan bagi perkembangan komunitas yang bersangkutan oleh karena akan mempersempit cakrawala berpikir, tidak dapat saling memanfaatkan peluang yang terbuka dengan masyarakat makronya dan dalam jangka panjang proses pembaruan akan lebih cepat mencapai titik jenuh. Apabila hal ini terjadi, justru dianggap menentang arus dan berlawanan dengan kecenderungan globalisasi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan proses pemberdayaan melalui pengembangan masyarakat (*community development*). Sebagaimana yang dirumuskan Christenson dan Robinson (1989: 14) bahwa *community development* merupakan suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan lingkungan mereka. Dari rumusan ini dalam pengembangan masyarakat, intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah inisiatif atau prakarsa dan partisipasi masyarakat. Prinsip dari pola dalam pengembangan masyarakat adalah (1) Fokus perhatian ditujukan pada komunitas sebagai suatu kebulatan (2) Berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan komunitas (3) Mengutamakan prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat.

Diletakkannya komunitas sebagai fokus lebih memungkinkan bila ditengok dari sisi identitas dan karakteristik konsep komunitas tersebut (Conyers, 1994: 190). Pertama, komunitas memiliki komponen-komponen fisik, yang menggambarkan adanya kelompok manusia yang hidup di daerah tertentu dan saling mengadakan interaksi. Kedua, anggota-anggota komunitas memiliki beberapa ciri khas yang sama yang menyebabkan timbulnya identifikasi mereka sebagai sebuah kelompok. Ketiga, suatu komunitas pada umumnya memiliki keserasian dasar dalam perhatian dan aspirasi.

Berbagai karakter yang melekat pada komunitas tersebut memungkinkan dalam kehidupan yang berada pada suatu lokalitas tertentu terkandung adanya kesadaran kolektif dan solidaritas diantara warganya. Kesadaran kolektif dan solidaritas sosial tadi merupakan modal sosial dan energi sosial yang cukup besar dalam mendasari tindakan bersama bagi peningkatan kehidupan bersama baik sosial, ekonomi maupun kultural. Selanjutnya, agar tindakan bersama lebih bersandar pada prakarsa dan partisipasi masyarakat sendiri dibutuhkan adanya kompetensi masyarakat terhadap proses pembangunan di lingkungan kehidupannya. Kompetensi yang diharapkan meliputi kompetensi pada setiap warga secara individual maupun komunal sebagai keseluruhan dan kebulatan bersama. Kompetensi dalam proses pengembangan masyarakat dapat diwujudkan dalam dua hal yakni tanggung jawab sosial dan kapasitas.

Komunitas yang kompeten jika (1) Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas (2) Mampu mencapai kesepakatan mengenai sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas (3) Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disepakati bersama (4) Mampu bekerjasama secara rasional dalam bertindak mencapai sasaran (Ndraha, 1987: 58). Dalam pandangan lain, pendekatan *self-help* menekankan demokratisasi dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia dalam perwujudannya sebagai landasan pembangunan berbasis masyarakat. Dimana proses pembangunan harus menghasilkan (1) Terciptanya "solidaritas baru" yang mendorong pembangunan berakar dari bawah (*grassroot oriented*) (2) Memelihara keberagaman budaya dan lingkungan dan (3) Menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat (Golet, 1977). Atau

dalam pandangan Korten (1984) pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*). Teori ini menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Dalam konteks ini, Tjokrowinoto (1986: 10), memberikan gambaran ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada masyarakat: (1) Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri, (2) Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka, (3) Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal, (4) Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses belajar sosial (*social learning*) yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan mendasari saling belajar, (5) Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-stuktur pembangunan di tingkat lokal.

Dengan demikian, dalam perubahan sosial diperlukan kerjasama yang melibatkan semua pihak. Namun yang diharapkan terjadinya kerjasama yang tidak biasa, yakni kerjasama berkesinambungan. Dimana kerjasama diharapkan melahirkan sinergi, baik horizontal (antara pemerintah lokal, masyarakat, dan dunia usaha) maupun vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah). Secara etimologi kolaborasi adalah “collaborative” berasal dari kata “co” dan “labor.” Kolaborasi dimaknai situasi di mana dua orang atau lebih belajar atau mencoba mempelajari sesuatu bersama-sama dan lebih banyak lagi khusus sebagai pemecahan masalah bersama,” dijelaskan ahli dalam bidang ini. Menurut Sony Kusuma, kerjasama yang berkesinambungan disebut dengan kolaborasi. Apa sebenarnya makna Kolaborasi? Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Sehingga kata kunci dari kolaborasi adalah keterpaduan, atau yang dikenal dengan harmonisasi.

Terdapat 8 karakteristik kolaborasi menurut Carpenter (2009), yaitu: 1) Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis. 2) Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. 3) Adanya tujuan yang masuk akal. 4). Ada pendefinisian masalah. 5) Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. 6) Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagi pilihan. 7) Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat, dan 8) Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. . Sedangkan menurut Edralin dan Whitaker (dalam Keban, 2007), prinsip dasar yang berlaku umum tersebut sebagaimana prinsip dasar dalam konsep good governance yaitu antara lain: 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) Partisipatif, 4) Efisiensi, 5).Efektivitas, 6) Konsensus, dan 7) Saling menguntungkan dan memajukan.

Selain itu, dalam konteks pembangunan melalui pendekatan *self-help* dan kolaborasi juga lahir dari proses pendidikan masyarakat. Kenny (tanpa tahun) melihat pendidikan masyarakat yang lebih ideologis sebagai proses pendidikan komunal menuju pemberdayaan, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan dan pembelajaran yang berakar pada proses pemberdayaan, keadilan sosial, proses perubahan, tantangan, penghargaan, dan kesadaran kolektif. Pendidikan masyarakat merupakan upaya membangun kapasitas masyarakat lokal untuk terlibat dalam mengembangkan respon terhadap ketimpangan struktural dan pendidikan serta untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan dalam masyarakat (Sudiapermana, Elih, 2021: 44).

Pendidikan masyarakat bukan hanya tentang memberikan pendidikan di masyarakat, tetapi tentang mempromosikan keadilan sosial. Atau dalam pandangan Freire (Smith, 2001) disebut *conscientizacao*. *Conscientizacao* bukanlah sekedar teknik untuk transfer informasi, atau bahkan untuk pelatihan keterampilan, tetapi merupakan proses dialogis yang mengantarkan individu-individu secara bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah eksistensial mereka. *Conscientizacao* mengemban tugas pembebasan, dan pembebasan itu berarti penciptaan norma, aturan, prosedur dan kebijakan baru. Pembebasan bermakna transformasi atas sebuah sistemrealitas yang saling terkait dan kompleks, serta reformasi beberapa individu untuk mereduksi konsekuensi-konsekuensi negatif dari perilakunya.

Pendidikan dalam segala bentuknya tidak hanya mengajarkan materi kepada peserta didik, lebih dari itu, pencarian jawaban secara kooperatif atas masalah-masalah yang tak terpecahkan yang dihadapi oleh sekelompok orang. Setiap individu memiliki kebenaran yang sama, tetapi berbeda dalam hal cara Partisipasi disini dipandang inti dari proses pendidikan, dimana memposisikan peserta didik dalam kapasitas individu yang memiliki kebebasan untuk berkespresi, mengembangkan potensi kreatifnya, dan pengembangan kapasitas intelektualnya. Peserta didik harus ditempatkan sebagai pusat (center) dari aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Sebaliknya pendidik/guru hanya fasilitator, pembimbing yang menjadi mitra didik.

Dengan cara pandang ini, pendidikan masyarakat dianggap sebagai proses memecahkan akar masalah penindasan dan ketidakadilan, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisa bagaimana hal tersebut muncul dalam situasi dimana mereka berada. Peserta kemudian didukung untuk bertindak dan menggunakan pengetahuannya untuk mempengaruhi perubahan bagi mereka sendiri atau masyarakat mereka, yang akan mengarah pada kesetaraan yang lebih besar. Dengan demikian, pendidikan masyarakat memiliki karakteristik (1) Sebagai proses perubahan sosial, (2) Fasilitasi sebagai dasar untuk pendidikan masyarakat, (3) Pendidikan masyarakat sebagai agen pembangunan yang mengangkat isu-isu seputar ketimpangan sosial dan budaya, seperti kemiskinan, penelantaran, dan kerugian lainnya. Lebih tegas, bahwa konsep ini menekankan sebagai model transformasi sosial, yang berpihak pada anggota masyarakat terlemah. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat bertujuan memberdayakan peserta dengan keterampilan, pengetahuan, dan analisa kolektif untuk keluar dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang atau menuju perubahan sosial yang baik (Elih Sudiapermana, 2021: 46).

Pendidikan masyarakat menurut Mark K Smith (1999, 2007) tidak hanya penting pada tingkat individu untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan serta mengembangkan kepercayaan dan harga diri. Pada tingkat masyarakat juga dipandang penting, bahwa orang-orang harus mampu mengembangkan kapasitas mereka untuk berinteraksi sebagai kelompok, menangani masalah-masalah lokal yang mempengaruhi kelompok dan menganalisa situasi mereka sendiri dan masyarakat. Dia menggambarkannya sebagai pendidikan untuk masyarakat dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat bukan hanya tempat atau konteks dimana pendidikan akan berlangsung, tetapi membina masyarakat juga menjadi perhatian utama.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan mengenai partisipasi perempuan di Kampung Perca yang melahirkan perubahan sosial melalui kolaborasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dapat disimpulkan; *pertama*, meletakkan inisiatif maupun prakarsa dan proses pengambilan keputusan dilakukan oleh komunitas perempuan sendiri. *Kedua*, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber

yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan dan perencanaan mereka pada perempuan di Sindangsari melalui peningkatan kapasitas SDM perempuan melalui kursus menjahit yang difasilitasi satuan pendidikan nonformal yang ada di daerah itu yakni kursus menjahit HAS. *Ketiga*, pendekatan yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi lokal, dimana banyak sekali limbah/sampah kain yang berasal dari pabrik maupun konveksi belum dimanfaatkan di wilayah Sindangsari. *Keempat*, di dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditekankan melalui proses belajar sosial (*social learning*) yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi/ pejabat dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan mendasari saling belajar. Kehadiran Gubernur Jawa Barat serta Walikota Bogor menjadikan Kampung Perca dapat terfasilitasi oleh kebijakan maupun program-program pemerintah. Dan, *Kelima*, terbentuknya proses jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri. Melalui proses *networking* ini terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid & Muhhamad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Badudu, Sultan Muh. Zain. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard. (2009) *Strategic Management: A Dynamic Perspective, 2nd Edition*. New Jersey: Pearson Printice Hall.
- Christenson, James A and Jerry Robinson. (1989). *Community Development in Perspective*. Iowa State University Press, Ames.
- Comb, Philip and Manzoor Ahmed. (1980). *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan melalui Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Rajawali.
- Connolly, B (2003). *Community Education: Listening to the Voice, in The Adult Learner*. The Journal of Adult and Community Education in Ireland, pp 9-19.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Halim, Abd. (2018). *Politik Lokal, aktor, Problem dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Kenny, M, (tanpa tahun). *Community Education & Development Degree Module Level 8*, Departemen of Adult and Community Education, NUI Maynooth.
- Koesbandijah, S., -, W., & Puji Astuti, T. (2013). *Relasi Gender Dalam Komunitas Miskin Duku Kayon Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Journal of Educational Social Studies, Vol 2 No 1 2013.
- Komar, Oong. (2006). *Filsafat Pendidikan Non Formal*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lyon, Larry. (1987). *The Community in Urban Society*, The Dosey Press, Chicago.
- Rosyidah & Dwisetyani. (2007). *Gender and Productive Healthy Study: Folicy Brief No. 10*. Australian Demographic and Social Research Institute: The Australian National University.
- Smith, Mark K. (1999, 2007). *Animateurs, animation and fostering learning and chane, the encylopaedia of informal education*
- Smith, WA. (2001). *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soetomo. (2012). *Pembangunan Masyarakat Marangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2013). *Startegi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiapermana, Elih. (2021), *Pendidikan Masyarakat: Merdeka Belajar dan Memerdekakan*. Bandung: Frasa Media.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tilaar, HAR. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Titi Darmi. (2016). *Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa)*, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Juni 2016 Vol. 18. Manajemen Publik), 5 (2), September 2017, 217-22.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1986). *Masalah dan Tantangan Pembangunan Masyarakat*, makalah pada Seminar Nasional dan Kongres V HIPPIIS, Ujung Padang 15 Desember, 1986.
- Yeremias T. Keban. (2007). *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta